



**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DOKUMEN INFORMASI**

**KINERJA PENGELOLAAN**

**LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

**KABUPATEN BALANGAN**

**TAHUN 2025**

**DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BALANGAN**



## DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN.....	2
II	ANALISIS DPSIR ISU LINGKUNGAN HIDUP.....	3
2.1	TATA GUNA LAHAN .....	3
2.2	KUALITAS AIR.....	5
2.3	KUALITAS UDARA .....	6
2.4	RISIKO BENCANA.....	8
2.5	PERKOTAAN.....	10
2.6	TATA KELOLA .....	12
III	ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP.....	14
IV	INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....	15
V	RENCANA TINDAK LANJUT .....	21



**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**DOKUMEN INFORMASI KINERJA**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
**TAHUN 2025**

**I PENDAHULUAN**

Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Februari 2003 yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibu kota berada di Kota Paringin. Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat di berbagai sektor. Pertumbuhan ini tidak hanya membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, namun juga menimbulkan dampak terhadap kondisi lingkungan hidup. Salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah ketersediaan data dan informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pihak.

Pemerintah Kabupaten Balangan mengambil langkah awal dalam menyampaikan data dan informasi mengenai lingkungan hidup daerah dengan menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Dokumen IKPLHD ini bertujuan menyediakan gambaran objektif mengenai kondisi lingkungan, sebagai instrumen evaluatif kinerja pengelolaan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Tahapan penyusunan Dokumen IKPLHD ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan pendekatan metode D-P-S-I-R (Driving Forces-Pressure-State-Impact-Response). Dokumen IKPLHD memuat informasi terkait kondisi lingkungan, permasalahan yang dihadapi, kebijakan yang diterapkan, serta program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.



## **II ANALISIS DPSIR ISU LINGKUNGAN HIDUP**

Analisis kondisi lingkungan hidup daerah disusun dengan menggunakan pendekatan DPSIR (Driving Forces–Pressures–State Impacts–Responses). Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam menyusun kerangka analisis yang komprehensif terhadap isu-isu lingkungan yang bersifat lintas sektor dan multidimensi. Dalam model DPSIR, aktivitas manusia diasumsikan sebagai driving forces (faktor pendorong) yang kemudian menciptakan pressures (tekanan) terhadap ekosistem. Tekanan ini mempengaruhi state (kondisi) lingkungan dan kesehatan manusia, yang selanjutnya menimbulkan impacts (dampak) yang signifikan. Dampak tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai responses (tanggapan) berupa kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk mengatasi atau mengurangi risiko yang ditimbulkan.

### **2.1 TATA GUNA LAHAN**

#### **2.1.1 Driving Force**

Perubahan tata guna lahan didorong oleh dinamika pembangunan dan pertumbuhan sosial-ekonomi. Pertumbuhan populasi di Kabupaten Balangan signifikan, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,27% dari 2020-2024, meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman, fasilitas umum, infrastruktur, serta kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga menjadi pendorong, dengan PDRB mencapai Rp 21.764,18 miliar pada tahun 2024 dan pertumbuhan tahunan rata-rata 12,6% selama lima tahun terakhir. Sektor pertambangan dan penggalian mendominasi ekonomi lokal, berkontribusi 72,61% terhadap total PDRB, sementara pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya 7,87%. Dominasi pertambangan ini berpotensi besar menyebabkan konversi lahan produktif menjadi area tambang, industri, atau permukiman. Kebijakan pembangunan daerah juga memengaruhi alokasi penggunaan lahan.



### **2.1.2 Pressure**

Tekanan utama berasal dari alih fungsi lahan hutan dan pertanian serta berkurangnya lahan pertanian produktif. Praktik perambahan hutan untuk pembukaan lahan pertanian baru menyebabkan terputusnya ekosistem dan penurunan tutupan vegetasi alami. Konversi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan industri ekstraktif (pertambangan batubara) dan permukiman juga merupakan tekanan signifikan. Terjadi ketimpangan luas lahan non-pertanian (34.606,05 hektare) dan lahan sawah (8.615,26 hektare), menunjukkan tekanan terhadap penurunan lahan produktif untuk pertanian.

### **2.1.3 State**

Kondisi tata guna lahan saat ini mencerminkan penggunaan lahan yang ada akibat tekanan dan pendorong pembangunan. Pemerintah menilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) untuk menggambarkan kemampuan wilayah mempertahankan ekosistem lahan yang sehat. IKL Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah 51,90, yang masuk kategori sedang ( $50 \leq \text{IKL} < 70$ ). Berdasarkan penggunaan lahan diketahui luas lahan perkebunan mencapai 39.815 hektare, terutama di Batumandi (7.535 ha) dan Awayan (7.621 ha). Lahan hutan masih cukup luas di Kecamatan Halong (13.140 ha). Sementara itu, luas lahan sawah relatif terbatas dan semakin terfragmentasi, memperlihatkan tekanan dari pembangunan yang mendesak lahan pertanian.

### **2.1.4 Impact**

perubahan tata guna lahan tercermin dari meningkatnya lahan kritis dan degradasi lahan. Berdasarkan data, Kabupaten Balangan memiliki 22.196 hektare lahan sangat kritis, 14.798 hektare lahan kritis, 33.225 hektare lahan potensial kritis, dan 38.304 hektare lahan agak kritis. Hanya sekitar 19.380 hektare lahan yang tercatat tidak kritis. Selain itu, kerusakan lahan gambut mencapai 7.089,33 hektare (100% rusak), atau sekitar 3,88% dari total luas wilayah kabupaten. Kerusakan ini



menyebabkan hilangnya fungsi ekologis, meningkatkan risiko banjir, kekeringan, serta memperparah degradasi tanah.

### **2.1.5 Response**

Pemerintah Kabupaten Balangan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 18 taman. Pemerintah Kabupaten Balangan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian secara masif. Perda ini juga mengatur mekanisme pengendalian, pengawasan, dan sanksi.

## **2.2 KUALITAS AIR**

### **2.2.1 Driving Force**

Faktor pendorong utamanya adalah pertumbuhan penduduk yang meningkat menjadi 138,95 ribu jiwa pada 2024. Kebutuhan air bersih semakin meningkat, diiringi aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri rumah tangga. Aktivitas ekonomi tersebut menyebabkan permintaan air yang semakin besar. Kebutuhan domestik air bersih di Kabupaten Balangan sebagian besar dipenuhi melalui air leding (43,43%) dan air kemasan bermerek/isi ulang (32,24%), diikuti oleh sumur terlindung, sumur tak terlindung, serta sumur bor/pompa.

### **2.2.2 Pressure**

Tekanan terhadap kualitas air muncul dari alih fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Luas lahan di Kabupaten Balangan didominasi oleh penggunaan untuk perkebunan (39.815 ha), diikuti oleh perikanan (11.605,5 ha) dan pertanian/sawah (8.615,26 ha). limbah domestik dari 1.118 KK yang masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Praktik buang air besar di sungai dan fasilitas yang tidak layak secara langsung meningkatkan risiko pencemaran air.



### **2.2.3 State**

Kondisi kualitas air kategori sedang dan sudah melampaui target daerah sebesar 50. Berdasarkan pemantauan di enam titik sungai Balangan dan Muara Pitap (Tabel 2.5), nilai pH berkisar antara 7,17–8,20 (masih dalam baku mutu), nilai TSS pada beberapa titik sempat melebihi baku mutu maksimal 50 mg/L, nilai TDS tetap rendah (74–143 mg/L), dan kadar DO masih cukup baik (5,44–7,86 mg/L).

### **2.2.4 Impact**

Dampak penurunan kualitas air meliputi peningkatan risiko penyakit. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang menderita diare sebanyak 1.637 jiwa. Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang paling umum terjadi sebagai akibat langsung dari kualitas air yang buruk. Dampak lainnya adalah terganggunya estetika lingkungan disekitar badan air.

### **2.2.5 Response**

Sebagai respon, dilakukan pemantauan rutin kualitas air, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan regulasi pengelolaan limbah domestik dan industri. Pemantauan kualitas air dilakukan di enam titik utama di Sungai Balangan dan Sungai Pitap yang dilaksanakan empat kali dalam setahun. Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang bertujuan untuk mengendalikan pembuangan limbah, melindungi kualitas air tanah dan permukaan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **2.3 KUALITAS UDARA**

### **2.3.1 Driving Force**

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Balangan merupakan salah satu driving force kualitas udara. Terjadi penambahan penduduk sekitar 2.000 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total penduduk pada tahun 2024 mencapai sekitar 138,12 jiwa. Pertambahan



jumlah penduduk ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan transportasi, Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, tercatat sebanyak 56.909 unit, terdiri dari 54.342 sepeda motor, 5 mobil penumpang, 16 mobil bus, 2.332 mobil barang, dan 214 kendaraan khusus.

### **2.3.2 Pressure**

Perluasan jaringan jalan mendorong pertumbuhan volume kendaraan bermotor yang menjadi sumber utama pencemaran. Aktivitas konstruksi jalan juga menghasilkan debu dan partikel tersuspensi. peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik dari 229,839 km pada tahun 2022 menjadi 275,108 km pada tahun 2024. Kondisi rusak berat masih mendominasi pada tahun 2024 dengan panjang mencapai 181,341 km, atau sekitar 32% dari total jaringan jalan yang ada. Sementara itu, total panjang jalan relatif tetap dari 2023 ke 2024, yaitu sekitar 567 km. Pesatnya pembangunan infrastruktur transportasi dikarenakan kabupaten Balangan terletak di jalur strategis menuju Ibu Kota Negara (IKN).

### **2.3.3 State**

Kualitas udara tergambarkan dalam Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Balangan pada tahun 2024 tercatat sebesar 97,23, yang masuk dalam kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil pemantau konsentrasi tertinggi menunjukkan nilai  $SO_2$  sebesar  $10,34 \mu g/m^3$  dan  $NO_2$  sebesar  $9,52 \mu g/m^3$  yang masih dibawah baku mutu. Suhu udara menunjukkan variasi musiman yang relatif stabil dengan kisaran suhu rata rata bulanan antara  $26,68^\circ C$  (terendah pada bulan Juli) hingga  $28,25^\circ C$  (tertinggi pada bulan Mei). Kelembaban udara tahunan tergolong tinggi, dengan rata-rata bulanan berkisar antara 76,63% (terendah pada bulan September) hingga 86,81% (tertinggi pada bulan Desember).

### **2.3.4 Impact**

Menurunnya kesehatan masyarakat akibat perubahan kualitas udara. Penyakit yang berhubungan dengan kualitas udara ialah ISPA



mencapai 5.688 kasus dan penyakit pilek sebanyak 2.768 sebagai penyakit gangguan pernafasan. Penyakit pernapasan lainnya yaitu pneumonia merupakan jenis infeksi paru-paru yang dapat diperparah oleh kualitas udara yang buruk. Tahun 2024 penyakit pneumonia diderita 1.502 masyarakat Kabupaten Balangan.

### **2.3.5 Response**

Response pemerintah yaitu pemantauan kualitas udara serada berkala Pemantauan ini dilaksanakan selama empat belas hari berturut-turut di 8 titik, dalam satu periode pemantauan dan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Pengujian emisi kendaraan bermotor dilakukan secara berkala dengan 33 kendaraan roda 4 dengan hasil yang lulus uji. Pemerintah juga melibatkan masyarakat dengan aktif dalam Proklim dan mengembangkan RTH. Pengembangan dan peningkatan angkutan umum pemerintah juga menyediakan layanan angkutan umum gratis bernama Angkutan Sanggam

## **2.4 RISIKO BENCANA**

### **2.4.1 Driving Force**

Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Balangan sebanyak 76 orang per kilometer persegi dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan konsentrasi di daerah-daerah tertentu juga menimbulkan tantangan dalam hal mitigasi dan penanggulangan bencana. Curah hujan tertinggi mencapai 558 mm, diikuti oleh November dengan 437,10 mm dan Desember sebesar 358,10 mm. Dapat menyebabkan risiko banjir dan tanah longsor Sebaliknya, pada bulan-bulan dengan curah hujan rendah seperti Agustus (16,20 mm) dan September (34,40 mm), tekanan risiko bencana bergeser ke arah potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan.

### **2.4.2 Pressure**

Perubahan penggunaan lahan dari kawasan hutan, sempadan sungai, dan lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, industri,



perkebunan, atau pertambangan skala besar telah menyebabkan terganggunya fungsi ekologis lahan yang selama ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis dan kestabilan tanah. Perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana menjadi salah satu tekanan (pressure) signifikan yang memperbesar risiko bencana di Kabupaten Balangan. Di Kabupaten Balangan terdapat 47, 65 Hektar luas permukiman kumuh.

#### **2.4.3 State**

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kondisi aktual risiko bencana adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). RB Kabupaten Balangan menurun dari 139,89 pada tahun 2020 menjadi 104,24 pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan indikasi bahwa risiko bencana di wilayah tersebut semakin terkendali berkat peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan respons terhadap bencana. Bencana banjir tercatat terjadi sebanyak 4 kali, khususnya di wilayah yang dialiri sungai besar. Di sisi lain, tercatat pula 2 kejadian tanah amblas, 1 kejadian longsor, dan 25 kejadian pohon tumbang. Tercatat juga 28 peristiwa kebakaran.

#### **2.4.4 Impact**

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan, sepanjang tahun 2024 tersebut terjadi 58 kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, tanah amblas, dan pohon tumbang. Dari keseluruhan peristiwa kebakaran tercatat sebanyak 54 Kepala Keluarga (KK) terdampak dengan total 133 jiwa yang mengalami berbagai bentuk kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang terjadi akibat risiko bencana sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kerugian materiil hingga gangguan terhadap kelangsungan sosial dan ekonomi.



### **2.4.5 Response**

Upaya peningkatan pelayanan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan dimulai dengan penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah daerah juga membangun pos siaga bencana dan gudang logistik di beberapa titik strategis di kecamatan-kecamatan. Peningkatan Keberadaan Desa tangguh Bencana (Destana) dan ditetapkan 3 desa sebagai Destana tingkat provinsi, yaitu Desa Galumbang di Kecamatan Juai, Desa Baruh Panyambaran di Kecamatan Halong, dan Desa Pimping di Kecamatan Lampihong. Adanya inovasi Rumah Panggung Evakuasi Bencana Berbasis Kemitraan (Bapangku Bamitra).

## **2.5 PERKOTAAN**

### **2.5.1 Driving Force**

Jumlah penduduk meningkat dari sekitar 130 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi lebih dari 138 ribu jiwa pada tahun 2024, sedangkan timbulan sampah harian juga menunjukkan peningkatan dari sekitar 56 ton/hari menjadi hampir 59 ton/hari. Peningkatan jumlah penduduk ini secara langsung berdampak pada bertambahnya volume sampah. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu driving force yang mendorong berbagai perubahan dalam struktur ruang dan lingkungan. Tahun 2021, yang mencapai pertumbuhan sekitar 3,27%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sekitar 5,24%.

### **2.5.2 Pressure**

Kabupaten Balangan menunjukkan tren penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2020 hingga 2024, di mana angka kemiskinan berkurang dari sekitar 6% menjadi mendekati 4%. Tekanan akibat kemiskinan menjadi lebih kompleks karena mendorong terbentuknya permukiman informal atau kumuh, peningkatan beban pada infrastruktur kota, dan risiko sosial seperti kriminalitas dan pengangguran terselubung. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur kesehatan dari aspek sanitasi di



Kabupaten Balangan menjadi salah satu bentuk tekanan karena masih terdapat sekitar 1,56% tidak terdapat tepat BAB. Temoat buang air besar sendiri sekitar 95,57% dan bsersama sekitar 2,32%.

### **2.5.3 State**

Total luas kawasan kumuh sebesar 47,65 hektar, sebanyak 44,97 hektar atau sekitar 94,38% yang menegaskan bahwa masih ada sebagian kecl kawasan kumuh yaitu 5,62%. Sebagian besar kawasan kumuh telah diperbaiki, namun masih ada titik-titik kritis yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Timbulan sampah tahunan sebesar 21.452,55 ton/tahun dan timbulan sampah harian sebanyak 58,77 ton/hari. Selama 3 tahun terakhir timbulan sampah mengalami peningkatan. Berdasarkan karakteristik sampah sisa makanan dan daun-daunan, yang mencakup sekitar 60,62% dari total timbulan sampah dengan rumah tangga menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah.

### **2.5.4 Impact**

Bersarkan data penyakit utama di Kabupaten Balangan terdapat tiga penyakit yang terjadi akibat dari tekanan dan keadaan isu perkotaan yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pilek, dan diare. Kondisi lingkungan yang memicu timbulnya penyakit-penyakit tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga secara langsung mengurangi nilai estetis kawasan perkotaan. Kondisi sampah yang ada di Kabupaten Balangan juga menambah beban operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA di Kabupaten Balangan ialah TPA Batu Merah yang terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong. TPA Batu Merah merupakan TPA Control Lanfill dengan luas 9,80 Ha dan berkapasitas 45 ton/hari.

### **2.5.5 Response**

Respon terhadap isu perkotaan ialah meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Kabupaten balangan memiliki 32 TPS, 10 TPS 3R, dan 71 bank sampah unit (BSU). Dari total unit BSU, sebanyak 60



unit (84,5%) dikelola oleh masyarakat, sedangkan hanya 11 unit (15,5%) dikelola oleh LSM. Partisipasi masyarakat penting dalam merespon isu perkotaan sehingga pemerintah giat mengadakan inovasi seperti rumah inovasi daur ulang mengubah sampah menjadi barang bermanfaat (Rindu Safaat) dan pilah sampah dapat sembako. Dalam hal kebijakan dan regulasi Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 37 dan Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.

## **2.6 TATA KELOLA**

### **2.6.1 Driving Force**

Driving force isu tata Kelola di Kabupaten Balangan salah satunya adalah pendapatan anggaran daerah (PAD) sebesar 175.902.102,77 rupiah dengan komponen terbesar berasal dari "lain-lain PAD yang sah" sebesar Rp137.073.648,74 (atau sekitar 78% dari total PAD). Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur PAD Kabupaten Balangan masih belum mencerminkan optimalisasi potensi fiskal lokal secara berkelanjutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan aktivitas ekonomi yang berpotensi memberikan tekanan terhadap lingkungan, seperti peningkatan sektor industri, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. PDRB ADHK tahun 2024 sebesar 10.821,60 miliar rupiah dan PDRB ADHB 21.764,17 miliar rupiah.

### **2.6.2 Pressure**

. Pressure dari isu tata Kelola adalah pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini muncul sebagai reaksi langsung dari masyarakat terhadap dampak lingkungan yang dirasakan akibat lemahnya pengawasan, pelanggaran izin, atau kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Terdapat satu pengaduan mengenai maraknya yang menanyakan terkait perizinan dan kewenangnya serta telah terselesaikan.



### **2.6.3 State**

Keradaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup juga turut memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Balangan. Terdapat 22 LSM yang tersebar di Kabupaten Balangan. Kolaborasi antara DPLH dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) semakin diperkuat melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi langsung oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Program/kegiatan yang diinisiasi masyarakat dalam tahun 2024 sebanyak 8 kali baik dalam pengelolaan sungai, sampah, dan perubahan iklim.

### **2.6.4 Impact**

Nilai IKLH meningkat dari 66,81 di tahun 2020 menjadi 70,8 pada tahun 2024. menandakan adanya pergeseran kualitatif dari kategori "Sedang" menjadi "Baik" pada tahun 2024, yang merupakan kemajuan signifikan dalam aspek lingkungan daerah. Berdasarkan anggaran pengelolaan lingkungan hidup Salah satu program yang mengalami peningkatan signifikan di antaranya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *yang naik dari Rp10,37* triliun pada tahun 2023 menjadi Rp12,94 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan dukungan administratif serta penguatan fungsi tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan.

### **2.6.5 Response**

Produk hukum yang mendukung pengelolaan lingkungan juga menjadi komponen penting dalam respons pemerintah. Satu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Dilakukan juga pengawasan izin lingkungan baik kegiatan pertambangan, perumahan, energi dan listrik, maupun perusahaan air minum ke 7 perusahaan tersebut memiliki hasil pengawasaaan yang taat. Kabupaten Balangan juga menerimapenghargaan salah satunya 5 besar nasional ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2024.



### III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Balangan dilakukan melalui tahapan sistematis, meliputi pengumpulan data dan kajian yang relevan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta pelaksanaan forum diskusi terfokus (FGD) untuk menjangkau pendapat ahli. Isu-isu yang teridentifikasi kemudian dianalisis dengan metode tertentu guna menentukan prioritas utama. Hasil analisis dan kompilasi informasi tersebut dirumuskan menjadi kajian isu prioritas yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup daerah.

Isu lingkungan hidup daerah di Kabupaten Balangan tahun 2025 diidentifikasi dari hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Penulis menggunakan pendekatan DPSIR. Hasil identifikasi tersebut kemudian dibahas bersama secara partisipatif dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen IKPLHD yang komponennya terdiri atas perwakilan dari beberapa perangkat daerah yang terkait, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan perguruan tinggi (akademisi).



Gambar 3. 1 Kegiatan FGD Penentuan Isu Prioritas Kabupaten Balangan

Isu prioritas dipilih dari permasalahan yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup serta keberlanjutan pembangunan daerah, sehingga memerlukan penanganan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Penetapan keempat isu prioritas ini juga



mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan, serta menunjukkan upaya serius dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Berikut ini disampaikan keempat isu lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebagai prioritas untuk tahun 2025:

1. Pembangunan yang pesat
2. Pengelolaan sampah yang belum efektif
3. Penurunan kualitas air permukaan
4. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana banjir dan tanah longsor

#### **IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam rangka menangani isu-isu prioritas di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Balangan, telah diterapkan sejumlah inovasi yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi
1	Si Angsa (Sistem Informasi Angkutan Sampah)	Si angsa adalah inovasi sistem informasi angkutan sampah yang memudahkan masyarakat dalam pelaporan sampah yang tidak terangkut di TPS perkotaan untuk segera ditangani. dengan Platform Digital SI ANGSA memberikan kemudahan dalam menggunakannya. Setiap orang yang memiliki akses WhatsApp dan Internet dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya. Tujuan dari inovasi Si Angsa adalah untuk Meningkatkan presentase penanganan sampah dari periode tahun ke tahun dan sebagai Alternatif pengaduan berbasis online system terkait persampahan
2	Papah Modis Dalang Batik (Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik)	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun agar lebih efisien dan efektif sehingga bisa menghindari penyebaran penyakit akibat Penyimpangan limbah medis yang pengelolaannya tidak sesuai Peraturan dan Perundangan yang berlaku. Pembaharuan Inovasi Papah Modis Dalang Batik di tahun 2023 dibanding di tahun sebelumnya adalah



Ringkasan Eksekutif  
Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah  
Kabupaten Balangan Tahun 2025

No.	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi
		Menambah alat/ mesin penunjang daur ulang limbah medis dengan membuat dan memodifikasi kompor yang bahan bakarnya dari minyak jelantah yang sudah dimodifikasi juga aman dari kontaminasi limbah lainnya sehingga menghasilkan lelehan infus yang siap dicetak yang tentu juga lebih hemat anggaran karena bahan bakar didapat secara percuma dari hasil operasional pengolahan penyediaan makanan di dapur Rumah Sakit. Dengan kata lain bukan hanya limbah medis infus yang didaur ulang akan tetapi kita juga mendaur ulang limbah non medis lainnya yakni minyak jelantah dari dapur sebagai bahan bakar untuk menunjang proses mendaur ulang limbah infus. Tujuan dari inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non- medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik adalah mengurangi sampah, melindungi lingkungan, memanfaatkan sumber daya terbarukan, menghemat energi dan sumber daya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan
2	Petik Langsung (Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam Layanan Membuang Sampah ke TPA)	Petik Langsung ini adalah inovasi yang penggunaan TIK sebagai salah satu cara percepatan pembuatan surat keterangan izin membuang sampah ke TPA Batu Merah Kabupaten Balangan bagi mobil pengangkut sampah desa. Hanya dengan mengakses secara online form surat keterangan pembuangan sampah ke TPA Batu Merah melalui perangkat seluler sehingga tidak perlu menunggu lama surat keterangan sudah dapat diterbitkan. Kegiatan membuang sampah di TPA menjadi lebih lancar, cepat dan efisien. Kegiatan Petik Langsung ini dilaksanakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam hal ini pemerintah desa dan pihak swasta turut serta dalam pengelolaan sampah dengan membuang sampahnya secara mandiri ke TPA. Kegiatan pemerintah desa turut serta dalam pengelolaan sampah dengan membuang sampahnya secara mandiri ke TPA adalah pertama kali di Provinsi Kalimantan Selatan.
5	Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna)	Inovasi untuk menstimulus perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak. Dengan adanya inovasi ini, tercipta kesadaran



Ringkasan Eksekutif  
Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah  
Kabupaten Balangan Tahun 2025

No.	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi
		masyarakat dalam meningkatkan gaya hidup bersanitasi bersih dan sehat serta terciptanya pandangan baru di masyarakat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan perawatan dan pengelolaan di bidang sanitasi tidak harus terlihat jorok atau tidak sedap dipandang mata. Tujuan dari pelaksanaan inovasi "TAKSI WARNA " adalah : 1. Optimalisasi penyadaran publik terhadap sanitasi yang layak dan aman sesuai standar. 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam menyukseskan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan penurunan angka stunting di Kabupaten Balangan
3	Basalaman (Balangan Sanitasi Layak dan Aman)	Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini Dinas PUPRPERKIM akan melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi data dengan SKPD teknis terkait lainnya sehingga mendapatkan one data ODF yang akan dijadikan sasaran inovasi Basalaman. Inovasi Basalaman dalam penyediaan sarana prasana sanitasi berkolaborasi dengan CSR Adaro Indonesia. Dalam rangka memperluas cakupan BABs memungkinkan penyediaan MCK Komunal yang menggunakan standar tangga septik yang aman. Perlunya intervensi untuk masalah pembangunan sanitasi, desa non ODF sebanyak 80 desa, yang sudah dibantu CSR Adaro Indonesia sebanyak 22 desa, bantuan dari dana desa sebanyak 13 desa sehingga ada 45 desa yang akan di analisis oleh Dinas PUPRPERKIM untuk memastikan intervensi DPU tahun 2024. tujuan inovasi : 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi layak dan aman di Kabupaten Balangan menjadi sebesar 94,76 % berdasarkan target RKPD 2024. 2. Mempermudah akses data terkait sanitasi layak dan aman di Kabupaten Balangan 3. Menjadikan Kabupaten Balangan sebagai Kabupaten yang ODF (Open Defecation Free ) atau SBS ( Stop Buang Air Besar Sembarangan ) 4. Meningkatkan peran masyarakat dalam menyukseskan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan penurunan angka



Ringkasan Eksekutif  
Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah  
Kabupaten Balangan Tahun 2025

No.	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi
		stunting di Kabupaten Balangan
8	Sapa Mama (Saringan Air Paralon, Menjenu Air Minum Aman)	Pengolahan air secara sederhana skala keluarga bagi masyarakat yang kualitas sumber air minumnya masih belum memenuhi baku mutu air minum. Tujuan : Tujuan inovasi ini adalah 1. Memberikan alternative pengolahan air secara sederhana skala keluarga bagi masyarakat yang kualitas sumber air minumnya masih belum memenuhi baku mutu air minum yang ditargetkan adalah 28,2 % keluarga yang belum terlayani PDAM dan PAMSIMAS sebagai sumber air minumnya. 2. Memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk membuat sendiri saringan air, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan air bersih 3. Mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal akses terhadap air bersih dan sanitasi
4	Smart RTLH (Pengajuan Proposal Usulan RTLH Berbasis Online)	Merupakan inovasi untuk Optimalisasi pendataan rumah tidak layak huni agar proposal dapat dengan cepat tersampaikan ke Dinas PUPR Perkim. Upaya yang dilakukan setelah Inovasi yaitu dapat dengan segera menerima usulan melalui media google form yang langsung di kirimkan oleh aparat desa/kelurahan tanpa menunggu proposal fisik yang dikirimkan ke Dinas, sehingga pendataan dapat segera dilakukan dan data terpusat serta terekam dengan baik dalam google form. Data yang sudah terkumpul dalam SMART-RTLH terintegrasi dengan inovasi KULA RAKAT. Tujuan dari pelaksanaan Inovasi "SMART-RTLH (Pengajuan Proposal Usulan RTLH Berbasis Online) " adalah 1. Optimalisasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni agar proposal dapat dengan cepat tersampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tanpa menunggu proposal fisik dikirimkan ke SKPD dengan menggunakan teknologi yang sudah tersedia agar efisien dalam waktu penginputan data pada SKPD. 2. Mempermudah dalam perekaman data dan kelengkapan proposal dengan menggunakan media google form dan terintegrasi dengan



Ringkasan Eksekutif  
Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah  
Kabupaten Balangan Tahun 2025

No.	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi
		KULA RAKAT
7	Bedah Seru (Bedah Rumah Seribu Unit)	Merupakan inovasi yang Mendukung Upaya menuntaskan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Balangan untuk menuntaskan kemiskinan. Tujuan dari pelaksanaan Inovasi "BEDAH SERU" (Bedah Rumah Seribu Unit) yaitu: 1. Menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman dan sehat; 2. Meningkatkan semangat dan kualitas hidup yang lebih baik; 3. Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas permukiman. 4. Menambah cakupan ketersediaan rumah layak huni dan persentase kawasan kumuh yang tertangani.
6	Paman Latif (Penanganan Permukiman Kumuh Secara Kolaboratif)	Merupakan Program kolaborasi antara perangkat daerah, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM) dan perangkatnya, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Penerima (KPP) serta masyarakat di dalam proses penataan dan penanganan permukiman kumuh . Keunggulan atau kebaruan dari Program Paman Latif adalah proses Penangan Permukiman Kumuh di Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan kolaboratif melibatkan semua pihak agar hasil yang didapatkan dalam penanganan permukiman kumuh menjadi maksimal. Tujuan inovasi : 1. Sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah 2. Wadah pembinaan bagi masyarakat permukiman kumuh 3. Meningkatnya partisipasi perangkat daerah antara perangkat daerah, lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) dan perangkatnya, tim inti perencanaan partisipatif (TIPP), kelompok swadaya masyarakat (KSM) permukiman, kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) serta masyarakat dalam penangan permukiman kumuh. 4. Untuk mengurangi permasalahan kumuh
9	Sisi Lokbana (Sistem Siaga Logistik Korban Bencana)	SISI LOKBANA merupakan Gerakan pertama yang dilakukan dalam penyelenggaraan logistik dengan menjalin koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan dan system distribusi. Tujuan utama Sistem Siaga Logistik Korban Bencana yang disingkat dengan sebutan SISI LOKBANA, adalah meningkatkan efektifitas dalam



Ringkasan Eksekutif  
Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah  
Kabupaten Balangan Tahun 2025

No.	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi
		penyelenggaraan logistik bantuan bencana yang meliputi; pengadaan, pencatatan, penyimpanan hingga pendistribusian
10	Si Jari Tanggoh (Sistem Jejeraing Rescue Tanggap dan Kokoh)	Proses penanganan bencana dapat berjalan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien. Info mengenai kebencanaan juga dapat dipantau kebenarannya sehingga berita hoax dapat dinetralisir agar tidak menimbulkan gejolak dan masalah di tengah masyarakat. Di daerah lain di Provinsi Kalimantan Selatan, belum ada jaringan tim reaksi cepat (TRC) kebencanaan yang menysasar hingga wilayah Kecamatan. sehingga bisa diklaim jika sistem jejaring tenaga kebencanaan yang berada di bawah naungan komando BPBD Balangan, merupakan sistem jejaring pertama yang sudah diterapkan di Kalimantan Selatan. Di daerah lain, Tim Reaksi Cepat (TRC) hanya berada di wilayah Kabupaten / Kota. Bahkan di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, juga masih ada BPBD yang tidak memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC). Sehingga sampai saat ini Si Jari Tanggoh (Sistem Jejaring Rescue Tanggap dan Kokoh) Kecamatan yang merupakan inisiasi dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan masih menjadi satu – satunya relawan tim reaksi cepat (TRC) yang menysasar hingga ke tingkat paling bawah Pemerintahan Daerah yakni pada tingkat Kecamatan. Dengan hadirnya si Jari Tanggoh di tengah kehidupan masyarakat Balangan, proses penanganan bencana dapat berjalan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien. Info mengenai kebencanaan juga dapat dipantau kebenarannya sehingga berita hoax dapat dinetralisir agar tidak menimbulkan gejolak dan masalah di tengah masyarakat. Tujuan Si Jari Tanggoh : 1. Meningkatkan kinerja BPBD Balangan dalam penanganan bencana di wilayah Kecamatan di Kabupaten Balangan pada sisi kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keefektivitasan kerja. 2. Memudahkan koordinasi terkait proses penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan dan Desa 3. Meningkatkan pelayanan dalam hal kebencanaan, yakni memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Balangan



No.	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi
		yang masuk kategori daerah rawan bencana. 4. Meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kekuatan pada proses penanganan bencana dengan simpul relawan lain seperti Damkar, Tim Adaro, Basarnas dan Relawan Desa

## V RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Balangan yang dapat digunakan untuk menangani isu prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Balangan diantaranya adalah:

### 1. Integrasi Kebijakan Tata Guna Lahan Berbasis Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Balangan perlu memperkuat kebijakan tata guna lahan dengan pendekatan berkelanjutan. Hal ini mencakup peninjauan ulang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dapat menyesuaikan dengan dinamika dan tekanan lingkungan yang terus berkembang. Pengendalian terhadap alih fungsi lahan, khususnya dari kawasan hutan dan pertanian ke fungsi non-lahan, perlu diperketat. Selain itu, perlindungan terhadap kawasan lindung dan sempadan sungai harus diperkuat melalui kebijakan teknis dan penegakan hukum. Upaya rehabilitasi lahan kritis dan reforestasi juga harus diprioritaskan untuk meningkatkan daya dukung lahan. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam bentuk regulasi baru atau revisi RTRW berbasis data Indeks Kualitas Lahan (IKL), serta penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

### 2. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kualitas Air

Perbaikan kualitas air permukaan di Kabupaten Balangan harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan pengawasan kualitas air sungai, sumur masyarakat, dan sumber air baku lainnya. Upaya ini perlu disertai dengan peningkatan infrastruktur sanitasi serta pengolahan limbah domestik secara terpadu, baik dalam bentuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal maupun individu. Rehabilitasi daerah tangkapan air dan sempadan sungai menjadi



bagian penting dari upaya perlindungan sumber daya air. Untuk mendukung hal ini, perlu diterbitkan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur pengelolaan limbah domestik dan perlindungan daerah resapan air secara lebih terstruktur dan terukur.

3. Pengendalian Pencemaran Udara dan Emisi Kendaraan

Langkah konkret yang perlu diambil dalam menangani pencemaran udara adalah menyusun inventarisasi sumber pencemar udara secara berkala. Selain itu, Pemerintah Daerah harus mendorong program kampanye kendaraan rendah emisi dan pelaksanaan uji emisi secara berkala untuk kendaraan bermotor. Kebijakan ini dapat difasilitasi melalui regulasi teknis mengenai ambang batas emisi dan insentif bagi penggunaan transportasi ramah lingkungan.

4. Peningkatan Ketangguhan Daerah terhadap Risiko Bencana

Kabupaten Balangan perlu memperkuat sistem mitigasi bencana melalui pemetaan dan pemutakhiran zonasi rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Pemerintah juga harus menyusun rencana kontinjensi berbasis masyarakat dan menyelenggarakan pelatihan tanggap darurat secara rutin. Rehabilitasi kawasan rawan longsor dan wilayah DAS hulu sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana secara ekologis. Implikasi dari rencana ini adalah perlunya instruksi atau kebijakan Kepala Daerah terkait integrasi risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan ruang dan pembangunan infrastruktur.

5. Perkuatan Tata Kelola Lingkungan

Kualitas tata kelola lingkungan hidup sangat bergantung pada kapasitas institusi yang menjalankannya. Oleh karena itu, penguatan SDM aparatur pengelola lingkungan melalui pelatihan dan bimbingan teknis menjadi krusial. Selain itu, alokasi anggaran khusus lingkungan harus dipastikan tersedia dalam APBD secara proporsional. Pemerintah juga perlu mendorong digitalisasi sistem pelaporan dan transparansi



publik agar kinerja pengelolaan lingkungan dapat diakses dan diawasi oleh semua pihak.

6. Dukungan terhadap Inovasi Daerah dan Peran Masyarakat

Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu memfasilitasi pengembangan inovasi lokal seperti bank sampah dan program kampung iklim. Perusahaan swasta juga harus didorong untuk berkontribusi melalui program CSR yang mendukung pelestarian lingkungan. Selain itu, forum komunikasi lingkungan hidup di tingkat desa dan kecamatan dapat dibentuk untuk mendorong dialog dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.